

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik (*Good Governance*), harus ada perkembangan kemajuan yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Salah satu prosedur baru yang hadir dalam pemerintahan saat ini adalah *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* merupakan salah satu acuan dalam menjalankan roda pemerintahan dimana dengan bekerja sama, otoritas publik dapat bersinergi dengan semua kalangan dalam mencapai tujuan pemerintahan. Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara definisi, para ahli mendefinisikan *collaborative governance* dalam beberapa makna yang ide utamanya sama, yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Collaborative governance muncul tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek. munculnya *collaborative governance* dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antar lembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi. Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *governance* yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi.

Kontribusi pihak non-pemerintah dalam administrasi akan memberikan kontribusi yang besar baik dalam hal perencanaan keuangan maupun pengembangan dalam administrasi yang ada, terutama melalui kerjasama yang dibuat. Hal ini merupakan pemikiran yang signifikan bahwa kontribusi dari berbagai komponen dalam administrasi akan mendorong perkembangan baru dan perasaan tanggung jawab bersama dalam berurusan dengan pemerintah saat ini. *Collaborative Governance* sangat penting mengingat fakta bahwa baik otoritas publik maupun non-pemerintah memiliki kewajiban yang tinggi terhadap upaya keamanan ekologi, namun tanpa bantuan dari berbagai mitra secara keseluruhan, keuntungan dari tanggung jawab ini tidak dapat dirasakan. Gagasan *Collaborative Governance* adalah teknik lain dalam administrasi yang melibatkan beberapa mitra dan otoritas pemerintah untuk mengejar pilihan bersama yang dibentuk dalam sebuah pertemuan. (Ansell dan Gashl, 2007).

Collaborative Governance merupakan salah satu gagasan yang tepat digunakan dalam membangun kemajuan manusia daerah melalui penguatan daerah. Sesuai dengan Permendagri RI tahun 2007 tentang kerangka kerja penguatan daerah, penguatan daerah dapat diartikan sebagai suatu teknik yang digunakan dalam peningkatan daerah sebagai upaya untuk memahami kapasitas dan kebebasan dalam eksistensi berbangsa dan bernegara. Penguatan daerah ada di berbagai bidang seperti kesejahteraan, pelatihan, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Di tingkat kota, dengan tujuan akhir untuk memajukan dan mengembangkan wilayah. Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak dikotomis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku Pembangunan.

Memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi haruslah menjadi paradigma baru dalam program pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Perubahan kondisi internal dan eksternal yang terjadi menuntut kebijakan yang tepat dari para pembuat kebijakan dalam Upaya pengembangan potensi wilayah pedesaan. Sudah saatnya menjadikan desa

sebagai pusat-pusat Pembangunan dan menjadikan daerah ini sebagai motor utama penggerak roda perekonomian. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan Pembangunan Desa salah satu Upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan potensi desa. Tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian Masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah: 1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab. 2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin. 3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha. 5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan. 6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/ Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program. Dalam mengembangkan potensi desa agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu langkah-langkah, dasar, dan strategi kebijakan yang cerdas. Dalam upaya pengembangan potensi desa perlu memberdayakan partisipasi masyarakat agar mereka merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal tersebut Desa Gemaharjo merupakan salah satu Desa di Indonesia yang juga melakukan pengembangan potensi Desa. Desa Gemaharjo terletak di wilayah Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Wilayah desa Gemaharjo berada di perbatasan antara wilayah Pacitan dan Ponorogo. Wilayah yang dimiliki oleh desa Gemaharjo adalah 1448 Ha.

Sebagian besar kelompok masyarakat Desa Gemaharjo sebelum adanya pengembangan budidaya sapi perah adalah agribisnis dan tidak memiliki kegiatan yang berbeda untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian, pada tahun 2014, mereka mendapatkan tawaran dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan untuk melakukan program pengembangan budidaya sapi perah. Program pengembangan budidaya sapi perah sendiri telah dimulai sejak akhir tahun 2014 dan terus berkembang hingga saat ini.

Awal mula adanya program pengembangan budidaya sapi perah di desa Gemaharjo adalah berawal dari keinginan masyarakat sendiri untuk dapat membudidayakan sapi perah. Awalnya masyarakat ingin mulai mengembangkan sapi perah dengan modal awal meminjam dari bank BNI. Semua hal lain dianggap sama, daerah setempat mendapat tawaran langsung dari Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Daerah Pacitan sebagai program pemenuhan pangan asal hewan peliharaan dan agribisnis hewan peliharaan perorangan memiliki pilihan untuk membudidayakan sapi perah di desa Gemaharjo. Bantuan sapi perah sebanyak 30 ekor yang disebarkan kepada dua kelompok peternak, yaitu kelompok peternak Gemah Ripah IV di vila Gemah dan kelompok peternak Gemah Ripah VII di vila Kaligondang. Setelah satu tahun, kelompok peternak Gemah Ripah IV di vila Gemah mendapat tambahan 15 ekor sapi. Kemudian, pada saat itu, kelompok peternak Gemah Ripah V di desa Bulusari juga mendapatkan tambahan 10 ekor sapi perah. Untuk hasil susu yang diperoleh bekerja sama dengan PT Nestle. Selain itu, dibangun pula sebuah ruang pendingin yang digunakan untuk mengawetkan susu baru yang dikumpulkan oleh peternak agar dapat bertahan cukup lama.. selain itu pemerintah juga memberikan bantuan berupa bibit rumput untuk pakan sapi perah. Selain dijual dalam keadaan mentah susu perah juga diolah dalam bentuk ramuan yaitu ramuan jamu subali, yang merupakan olahan dari susu segar yang dicampur dengan berbagai rempah-rempah. Namun usaha tersebut masih dilakukan secara terbatas karena produk olahan tersebut tidak bertahan lama dan hanya dibuat saat ada pesanan saja. Saat ini upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan mengembangkan olahan tersebut agar dapat menjadi produk yang bisa dipasarkan secara luas, usaha yang dilakukan adalah dengan

mempromosikan olahan tersebut baik secara langsung maupun secara online lewat media sosial yang dimiliki pemerintah desa Gemaharjo. Selain itu saat ini pemerintah desa juga sedang mengurus BPOM untuk olahan tersebut.

Penelitian yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dilakukan oleh Galuh Lutfi Febritasani dengan judul "Tata Kelola program pengembangan ternak sapi perah berbasis *Collaborative Governance* di Desa Gemaharjo Kabupaten Pacitan 2027". Merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* diselesaikan dalam peningkatan sapi perah di desa Gemaharjo yang kemudian dapat mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan target program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sapi perah terus berkembang, hal ini tergantung dari jumlah sapi yang berkembang dan jumlah susu yang dihasilkan. Tanda-tanda pencapaian *Collaborative Governance* dalam upaya bersama ini adalah struktur jaringan, orientasi hasil, kepercayaan satu sama lain, dan kolaborasi berdasarkan MOU.

Penelitian oleh Nur Cahya dengan judul "Proses *Collaborative Governance* Dalam Penerapan Uang Elektronik (UNIK) di Jalan Tol Kota Makassar". (2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* menggabungkan keadaan awal dengan adanya pedoman baru dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Indonesia sehingga siklus upaya terkoordinasi PT Bosowa Marga Nusantara dan Perbankan dalam pemanfaatan uang tunai elektronik di jalan tol kota Makassar. Rencana kelembagaan pelaksanaan UNIK dalam kerjasama ini adalah Dinas PUPR sebagai pengendali, PT Bosowa Marga Nusantara dan PT seksi empat jalan tol sebagai pelaksana fungsional administrasi dan penyedia kerangka kerja, perbankan dari bank BRI sebagai pendukung kartu UNIK, lebih spesifiknya BRIZZI. Administrasi dari PT Bosowa Marga Nusantara, PT Jalan Tol seksi empat dan bank BRI telah berjalan dengan ideal, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban dalam melakukan kerjasama.

Penelitian oleh Tika Mutiarawati dan Sudarmo yang berjudul “Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan”. menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan masih bersifat semi-formal, dan belum ada kesepakatan di antara para mitra yang secara eksplisit ditujukan untuk mengatasi banjir. Secara umum, para mitra telah bekerja sama dengan serius. Konsentrasi juga menunjukkan bahwa beberapa hal untuk pengumpulan upaya terkoordinasi tidak efektif karena tidak adanya kepercayaan antar mitra, administrasi yang buruk, kurangnya aset dan tidak meratanya tanggung jawab dan kewajiban. Berbagai variabel menghalangi upaya bersama termasuk sudut pandang yang berbeda mengenai pemikiran yang sempit, rendahnya kesadaran, dan pertanyaan di antara para mitra, tanggung jawab dan kewajiban yang tidak merata, serta aset manusia, spesialisasi dan moneter yang tidak memadai. Kajian ini mengasumsikan bahwa upaya bersama untuk menentukan banjir yang mengalir di Kota Bandengan tidaklah ideal dan perubahan diharapkan dapat mensinergikan sudut pandang mitra yang berbeda, mendekatkan diri dengan daerah setempat, dan menumbuhkan kolaborasi dengan berbagai pertemuan untuk mengatasi masalah aset, dan mendaftarkan SDM.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa ada collaborative governance yang melibatkan beberapa aktor dalam pengembangan budidaya sapi perah di Desa Gemaharjo yaitu pemerintah desa Gemaharjo, Dinas Tanaman pangan dan Pternakan Kabupaten Pacitan, PT Nestle dan Masyarakat peternak sapi perah. Yang dimana setiap aktor memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan program pengembangan sapi perah di desa Gemaharjo. Untuk itu penelitian ini menarik untuk dibahas untuk mengetahui model kolaborasinya, siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana peran setiap aktor yang terlibat dalam pengembangan budidaya sapi perah di Desa Gemaharjo. Berdasarkan urain latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“STUDI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA SAPI PERAH DI DESA GEMAHARJO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses collaborative governance dalam pengembangan budidaya sapi perah di desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui collaborative governance dalam pengembangan budidaya sapi perah di desa Gemaharjo kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mendeskripsikan pengembangan budidaya sapi perah di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang *collaborative governance* dalam pengembangan budidaya sapi perah di desa Gemaharjo kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca terkait *collaborative governance* dalam pengembangan budidaya sapi perah di desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah definisi mengenai istilah – istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Fungsi dari penegasan istilah yaitu untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah – istilah dalam penelitian. Adapun beberapa istilah yang peneliti gunakan ialah sebagai berikut:

1. *Collaborative Governance*

Collaborative Governance merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana melibatkan sektor pemerintahan maupun swasta untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Pengembangan

Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terarah dan terencana untuk membuat dan memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik.

3. Sapi Perah

Sapi perah merupakan sebuah hewan ternak yang dapat menghasilkan susu. Sapi perah merupakan sebuah hewan ternak yang biasa dikembangbiakkan untuk diambil susunya.

F. Landasan Teori

1. Konsep dan Pengertian *Collaborative Governance*

Sebelum memahami tentang *Collaborative Governance*, penting juga untuk mengetahui arti dari *Governance*, karena *Governance* adalah ide esensial dari *Collaborative Governance* umumnya digunakan sebagai padanan kata untuk menggantikan istilah "administrasi publik" atau pilihan apakah akan menyinggung hal yang sama atau tidak (Lan dan Rosenbloom, 1992; Peters dan Savoie, 1995; Salamon, 1989). Ungkapan "*Governance*" sebagai jenis kata ganti untuk "*Government*", pemahaman ini sangat normal, namun perlu diketahui bahwa "*Governance*" bukanlah kata yang setara dengan "*Government*". *Governance* berfokus pada pentingnya asosiasi mitra dalam siklus dinamis, hal ini dengan alasan bahwa interaksi dinamis dan pelaksanaannya semakin kompleks dan masalah yang dihadapi. (Sunu 2020).

Menurut Rhodes dalam Faradzman (2018:6) mendefinisikan *governance* sebagai "*self organizing interorganizational networks*" dan mengatakan bahwa pemerintah harus memiliki hubungan kerja seperti Lembaga swasta. *Governance* adalah bentuk dari konsep interaksi yang luas mencakup ekonomi, publik maupun perusahaan. Sedangkan menurut Gordon dalam Faradzman 2018:7 mendefinisikan administrasi publik

melibatkan semua individu, organisasi dan proses yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik, di mana memerlukan kerja sama bukan hanya dari pemerintahan tetapi juga sektor swasta dan masyarakat bahkan memungkinkan hubungan yang lebih baik kerja sama lokal, nasional hingga internasional.

Governance adalah proses pembuatan strategi dimana pendekatan yang dilakukan meliputi negara (pemerintah), sektor privat dan masyarakat umum selama waktu yang dihabiskan untuk membuat dan melaksanakan pengaturan (Kurniawan, 2007, hlm. 16-17). Secara khusus, ada lima prosesi mengenai *governance*:

1. *Governance* berfokus pada Lembaga dan sektor,
2. *Governance* mengidentifikasi munculnya kehilangan batas – batas dan akuntabilitas untuk mengatasi isu sosial dan isu ekonomi
3. *Governance* mengidentifikasi adanya hubungan saling menguntungkan antar Lembaga terkait
4. *Governance* merupakan sel – governing otonom para *stakeholder*
5. *Governance* meyakinkan untuk mengatasi sesuatu tidak harus mengandalkan kekuasaan pemerintah ataupun melalui melalui perintah dan wewenang (Stoker dalam Kurniawan, 2007, p. 16). (Dewi 2019)

Roderick Arthur William Rhodes menerangkan beberapa ciri mencolok dari *governance* dari hasil penelitian yang dilakukannya (Rhodes, 1996). Karakter tersebut terdiri dari 4 (empat), meliputi:

1. “*Governance*” bermakna lebih jauh daripada *government* karena adanya keterlibatan banyak pihak non-pemerintah yang menjadikan timbulnya hubungan saling menguntungkan;
2. Perlu terjalinnya hubungan timbal balik antar anggota untuk membangun kebutuhan pertukaran potensi dan negosiasi dengan maksud yang sama
3. Meyakini hubungan untuk bisa saling diandalkan dan merumuskan peraturan hasil dari negosiasi dan kesepakatan bersama

4. Memiliki kekuatan untuk dapat mengambil keputusan secara mandiri

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan *governance* adalah proses atau Kondisi, praktik, Latihan dalam menjalankan pemerintahan atau suatu program latihan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, perbaikan daerah, ekonomi termasuk pemerintahan, masyarakat, dan swasta atau pribadi.

Istilah *Collaborative Governance* adalah sebuah pendekatan untuk mengawasi pemerintah yang secara langsung melibatkan mitra di luar otoritas publik atau negara, yang berada pada kesepakatan dan konsultasi dalam sebuah siklus dinamis yang mengarah pada pembuatan atau pelaksanaan strategi publik dan proyek-proyek publik. Upaya bersama adalah sebuah gerakan yang dalam pengertian umum terletak pada *Collaborative Governance* dalam komunitas informal. Lembaga informal adalah hubungan pusat hubungan para mitra. Berdasarkan hal ini, dapat diduga bahwa hipotesis upaya terkoordinasi adalah pemeriksaan siklus administrasi dengan perspektif organisasi informal. Model *Collaborative Governance* mengharuskan semua mitra untuk berpartisipasi dalam diskursus, di mana para mitra ini menyampaikan diri mereka sendiri dalam mengkomunikasikan kecenderungan mereka. (Sunu 2020)

Robertson dan Choi mencirikan *Collaborative Governance* sebagai proses agregat dan kerakyatan di mana setiap anggota memiliki kekuatan yang dinamis dan setiap mitra memiliki kesempatan yang setara untuk mencerminkan keinginan mereka secara bersamaan. Bovaird mencirikan organisasi publik-swasta pada dasarnya sebagai rencana kerja dengan mempertimbangkan tanggung jawab bersama, jauh melebihi yang ditentukan dalam perjanjian apa pun antara asosiasi di area publik dan asosiasi di luar area publik.

Ansell & Gash (2007) menerangkan secara detail terkait *collaborative governance* selama beberapa dekade terakhir, konsep baru pemerintah telah lahir untuk manajerial dan mengkaji implemetasi kebijakan. Pemerintah

yang kolaboratif yang didefinisikan Ansell & Gash (2007, h. 544) bahwa *collaborative governance* bermakna: “*A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decisionmaking process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*”.

2. Aktor dalam *Collaborative Governance*

Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2011) menggambarkan *Collaborative Governance* yang membantu tidak hanya terbatas pada kaki tangan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah, namun juga diuraikan dengan adanya “*multipartner governance*” yang mengkonsolidasikan ranah-ranah privat, masyarakat, dan komunitas sipil secara keseluruhan, serta bergantung pada kerja sama para kaki tangan dan status rencana “*hybrid*” seperti investasi publik-privat-sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Balogh et al (Subarsono, 2011) mendeskripsikan *Collaborative Governance* yang membantu sebagai sebuah siklus dan rencana dalam implementasi kebijakan dan desain keputusan utama yang menggabungkan para pelaku yang berguna dari berbagai tingkatan, baik dalam tuntutan pemerintah maupun perkumpulan yang bersifat terbuka, tempat kerja yang bersifat pribadi, dan keseluruhan populasi untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilakukan oleh satu pihak.

Lemos dan Agrawal (2006: 297) mencirikan *Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada mitra yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah, tetapi juga dibingkai dengan adanya administrasi *multipartner* yang menggabungkan area yang berbeda, baik area privat maupun area rahasia, masyarakat dan masyarakat umum, serta didasarkan pada kolaborasi pekerjaan mitra dan pengaturan rencana silang seperti partisipasi publik-swasta (Cahya 2021).

Dari klarifikasi di atas, cenderung beralasan bahwa *Collaborative Governance* adalah administrasi yang mengharapkan untuk membuat dan mengatasi masalah. Tujuan penerapan *Collaborative Governance*.

Studi tentang pemangku kepentingan berasal dari studi manajemen dan administrasi bisnis (Brugha dan Varvasovszky, 2000), tetapi studi ini kemudian

berkembang diaplikasikan dalam kajian keilmuan yang lebih luas, misalnya dalam ilmu politik, kebijakan publik, studi pengembangan dan studi lingkungan. Billgren dan Holmén berpendapat bahwa konsep maupun pengertian pemangku kepentingan akan sangat tergantung pada kepentingan akademis atau persepsi ilmuwan yang mengkajinya (Billgren dan Holme, 2008).

Steve Rowlinson dan Yan Ki Fiona Cheung mendefinisikan pemangku kepentingan adalah setiap individu atau kelompok yang dapat memengaruhi kinerja serta pencapaian tujuan organisasi atau proyek (Rowlinson dan Cheung, 2008). Sedangkan Derek Walker, Arthur Shelley and Lynda Bourne mendefinisikan pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, hak atau kepemilikan dalam proyek dan dapat berkontribusi, dipengaruhi oleh proyek, baik pekerjaan atau hasil proyek (Walker, Shelley, dan Bourne, 2008).

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap permasalahan atau proyek yang akan diselesaikan.

Peran para pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan berdasarkan peranannya (Nugroho, 2014), antara lain:

1) Pembuat kebijakan

Pemangku kepentingan yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.

2) Koordinator

Pemangku kepentingan yang berperan mengoordinasikan pemangku kepentingan lain yang terlibat.

3) Fasilitator

Pemangku kepentingan sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.

4) Implementer

Pemangku kepentingan pelaksana kebijakan yang didalamnya termasuk kelompok sasaran.

5) Akselerator

Pemangku kepentingan yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Pemangku Kepentingan dapat dibagi menjadi 3 yaitu: Triple Helix, Quadra Helix dan Penta Helix

Triple Helix	Quadra Helix	Penta Helix
Pemerintah	pemerintah	pemerintah
Bisnis	Bisnis	Bisnis
Akademisi	Akademisi	Akademisi
	Organisasi non pemerintahan/ masyarakat umum	Organisasi non pemerintahan/ masyarakat umum
		Media Massa

Tabel 1.1 Pemangku kepentingan dalam Kolaborasi

Konsep triple helix yang dapat ditelusuri jejaknya sejak perang dunia kedua. Perang dunia kedua melahirkan konsep hubungan yang komprehensif antara ilmu pengetahuan (akademisi), sektor industri atau perdagangan (dunia usaha) dan sektor publik (pemerintah). Hubungan trilogi ini sangat jelas dan saling bergantung. Sektor publik yakni pemerintah menggunakan basis pajak untuk mendanai lembaga pengetahuan untuk meneliti teknologi dan produk inovatif. Sektor bisnis memproduksi hasil penelitian dan inovasi tersebut dan akhirnya sektor publik yakni pemerintah mendapatkan hasil melalui penarikan pajak.

Triple helix bahwa potensi inovasi dan pengembangan ekonomi terletak pada peran yang lebih menonjol dari sector universitas atau ilmu pengetahuan. Industri dan pemerintah menghasilkan sebuah format kelembagaan dan sosial baru dalam produksi, transfer dan penerapan pengetahuan. Intinya adalah bahwa ilmu pengetahuan mensyaratkan sektor publik untuk mendukung eksperimen dan penelitian karena sektor bisnis

tidak akan pernah mengambil risiko jika tidak mampu meyakinkan menghasilkan keuntungan. Demikian juga dibutuhkan sektor publik untuk mengembangkan kondisi atau tuntutan inovasi, terutama dalam hal komunikasi, transportasi dan sumber daya.

Triple helix agak generik namun jika menyangkut orang, maka pengguna harus masuk dalam daftar pemangku kepentingan. Triple helix mengasumsikan pemangku kepentingan tahu yang terbaik untuk pasar. Akhir 70-an membawa gelombang 'kolektif individu' yang sulit dilakukan bagi sektor perdagangan dan politik. Terbukti orang (konsumen) adalah materi. Sejak itu diperkenalkan pemangku kepentingan tambahan yakni pengguna, sehingga menciptakan konsep quadruple helix.

Quadruple Helix menjadi empat kelompok pemangku kepentingan. Masing-masing memiliki kontribusi yang sangat berharga. Quadruple helix membawa para aktor lebih dekat dan membawa pembicaraan ke level terendah pemangku kepentingan. Namun, dimensi keempat yakni pengguna, tampaknya diperlakukan sebagai konsumen daripada mitra sejati untuk penciptaan inovasi bersama.

Langkah terakhir penta helix adalah perbedaannya pada modal dan bisnis, keduanya mewakili pemangku kepentingan yang sangat berbeda. Pemangku kepentingan bisnis seringkali agresif, kompetitif, mengambil risiko dan siap untuk gagal. Penta helix bisa jauh melampaui, teknologi dan sains memasuki dimensi ruang yang melibatkan model bisnis inovatif, jaringan sosial dan sebagainya. Konsep penta helix adalah alat yang ideal untuk bekerja dengan model kompleksitas dan ekonomi, daripada model inovasi bisnis berbasis konsumen/ pasar.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aktor yang terlibat dalam kolaborasi terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemangku kepentingan dalam kolaborasi dapat digambarkan dalam tiga jenis kolaborasi yaitu: Triple Helix, Quartu Helix dan Penta helix. Dimana memiliki aktor yang berbeda-beda namun secara umum adalah: pemerintah, bisnis, organisasi non pemerintahan/ masyarakat umum dan media massa.

3. Tujuan Penerapan Collaborative Governance

Ansell dan Slice (2007:544) merekomendasikan bahwa pembenaran yang signifikan untuk melakukan *Collaborative Governance* adalah dengan alasan bahwa hal tersebut muncul karena adanya kekecewaan dalam pelaksanaan, mahal dan *Collaborative Governance* muncul dengan sengaja dan dibuat dengan sengaja dengan melakukan hal berikut ini:

- a. Konflik dengan kelompok kepentingan yang sulit diredam
- b. Pengelompokkan kelompok kepentingan
- c. Gagalnya penerapan kebijakan lapangan
- d. Rumit dan kebergantungan antar institusi
- e. Biaya yang tinggi

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah konsep tata Kelola pemerintahan yang sengaja dibuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

3. Faktor-faktor penting dalam Collaborative Governance

Ansell & Gash menyebutkan faktor-faktor yang penting dalam proses kolaboratif, adalah

- 1) tatap muka (*face-to-face dialogue*)
- 2) membangun kepercayaan (*trust building*)
- 3) pengembangan komitmen (*the development of commitmen*)
- 4) pemahaman Bersama (*shared understanding*).

5. Prinsip Penerapan Collaborative Governance

Daniel Seigler menyatakan delapan prinsip utama dalam meninternalisasi *Collaborative Governance* yaitu; masyarakat harus diikutsertakan dalam berbagai proses kebijakan publik:

1. Masyarakat harus mampu mandiri dalam mengelola sumber daya dan asset untuk menghindari masalah/konflik

2. Tenaga ahli dalam bidangnya harus selalu dilibatkan dalam proses penyelesaian permasalahan di masyarakat
 3. Pembuatan kebijakan harus dilakukan secara mufakat
 4. Kebijakan yang dibuat harus memiliki unsur Kerjasama secara terus menerus
 5. Kebijakan harus ideal
 6. Kebijakan yang dibuat harus dapat mengubah institusi dan menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, selain itu juga sebagai solusi ditengah – tengah masyarakat
 7. Kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada akuntabilitas/pertanggungjawaban (Seigler, 2011).
6. Model dan proses dalam *Collaborative Governance*

Ansell dan Gash dalam jurnalnya *Collaborative Governance in Theory and Practice* merumuskan model *collaborative governance* berdasarkan kajian literatur. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 (empat) indikator utama yakni: terdiri dari: (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif (Ansell dan Gash, 2008)

1) Kondisi awal

Kondisi awal adalah kondisi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi yang dapat menjadi pendukung atau penghambat terjadinya kerjasama antar pemangku kepentingan, dan antara lembaga/organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) variabel utama dari kondisi awal ini, antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh/kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan; sejarah masa lalu berupa kerjasama yang pernah dilakukan sebelumnya atau konflik yang pernah terjadi di antara para pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan hambatan dalam berpartisipasi dalam kolaborasi.

2) Desain Kelembagaan

Rencana kelembagaan menyinggung tentang bagaimana standar penting dalam upaya bersama, hal ini sangat penting mengingat fakta bahwa hal ini berubah menjadi keaslian prosedural dalam siklus kerja sama. Yang digarisbawahi dalam rencana kelembagaan ini adalah bagaimana standar permainan dalam mengambil bagian dalam upaya yang terkoordinasi, bagaimana diskusi dibingkai, jenis aturan eksekusi yang jelas dan bagaimana ada keterusterangan selama waktu yang dihabiskan untuk menjalankan kerja sama.

3) Kepemimpinan

Dalam berkolaborasi sosok seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya konflik ataupun perselisihan yang dapat menghambat jalannya kolaborasi.

4) Proses kolaboratif

Memulai interaksi kooperatif tidak dapat disangkal merupakan tantangan untuk mengetahui dari mana interaksi tersebut akan dimulai. Salah satu dari lima siklus koperasi dapat dimulai dari mana saja.

a. Pertukaran tatap muka

Semua administrasi koperasi didasarkan pada "pertukaran antar mitra". Pertukaran ini merupakan interaksi yang mengarah pada pengenalan kesepakatan/pemahaman. Wacana mitra ini biasanya diarahkan untuk membedakan pintu-pintu potensial yang terbuka dengan mengedepankan cerita bahwa akan ada "keuntungan bersama" bagi para mitra jika mereka dapat bekerja sama.

b. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak dapat dibedakan dari interaksi wacana. Para perintis upaya terkoordinasi harus memiliki pilihan untuk membangun kepercayaan di antara para mitra. Metode yang digunakan untuk membangun kepercayaan adalah proses yang panjang yang membutuhkan investasi dan membutuhkan tanggung jawab yang tinggi.

c. Komitmen terhadap interaksi kerja sama

Adanya hubungan yang tinggi di antara para mitra mungkin akan membangun kewajiban untuk bekerja sama. Perlu digarisbawahi bahwa bekerja sama tentu saja bukan hanya sekali saja, tetapi merupakan sebuah proses yang terus menerus dan bermanfaat.

d. Pemahaman Bersama

Pada titik tertentu para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman Bersama tentang apa yang akan dicapai. Pemahaman Bersama ini dapat berupa adanya tujuan Bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi Bersama juga sudah jelas dan pemahaman Bersama mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi

e. Hasil sementara

Cepat atau lambat, para mitra harus memiliki pilihan untuk menumbuhkan perspektif yang sama tentang apa yang dapat dicapai. Perspektif bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang masuk akal, makna yang jelas dari masalah yang dilihat oleh para mitra dan pemahaman tentang apa yang dapat dicapai.

Model berikut ini dianggap sebagai upaya terkoordinasi lintas area dimana model ini merupakan model yang terkenal dan dipromosikan oleh Bryson dan Crosby (2006: 44-45) dimana model ini terdiri dari situasi pengantar, desain dan administrasi, interaksi, kemungkinan dan keharusan, hasil dan pertanggungjawaban. Dari ide ini, terdapat titik konvergensi yang menyelidiki sisi siklus yang terdiri dari:

- 1) *Forging agreements* yakni proses kesepakatan bersama yang dilakukan oleh aktor yang terlibat
- 2) *Building leadership* yakni terlahirnya pemimpin yang mewakili maksud dan Kerjasama nantinya

- 3) *Building legitimacy* yakni membuat legitimasi dalam struktur, proses, dan siasat yang baik didalam kolaborasi
- 4) *Building trust* yakni terbentuknya hubungan Kerjasama dengan asas saling percaya antar stakeholder
- 5) *Managing conflict* yakni meminimalisir permasalahan yang terjadi
- 6) *Planning* merupakan hal paling krusial dalam penentuan tujuan, visi, misi, dan keterlibatan bebragai actor terkait sehingga menjadi standarisasi kesuksesan Kerjasama yang telah dibuat(Harmawan, Bagus Nauri Studi et al., 2016).

O'leary et al. menyatakan bahwa ada enam alasan mengapa *Collaborative Governance* seharusnya menjadi keputusan yang paling ideal dalam pemerintahan, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan masalah publik semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh satu asosiasi pemerintah sehingga membutuhkan multi pendekatan.
2. Beberapa asosiasi administrasi telah menyelesaikan sistem pengalokasian ulang hingga batas hirarkis yang tidak diragukan lagi membutuhkan instrumen pemikiran ulang rencana keuangan ekstra yang pada dasarnya memanfaatkan aturan kerja sama antara asosiasi pemerintah dan non-pemerintah berdasarkan kontrak kerja.
3. Ada perubahan dalam hubungan antar pemerintah di mana lokasi tengah mengizinkan pembuatan sistem yang berfungsi berdasarkan standar kerja sama dan perdagangan data bersama.
4. Mengupayakan kelangsungan proyek dan latihan yang didukung pemerintah dapat mendorong perwakilan pemerintah untuk membedakan pendekatan yang lebih baik dalam menawarkan jenis bantuan yang terbaik untuk daerah setempat.
5. Jaringan mencari bidang-bidang baru untuk diambil dan mengambil bagian dalam pemerintahan yang mempertimbangkan pemikiran kritis dan arahan kooperatif. Dalam konteks negara Indonesia jika

collaborative governance dapat melibatkan sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat dengan bekerja sama dapat memberikan perkembangan dalam bidang pemerintahan serta ekonomi dan dapat mencapai pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan *collaborative governance* merupakan proses kolaborasi atau kerja sama yang melibatkan sektor pemerintahan sektor swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu. Yang di dalam pelaksanaannya memiliki sejumlah model dan penerapan.

G. Definisi Operasional

Sesuai dengan rumusan masalah dan landasan teori maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Aktor yang terlibat dapat diukur dari berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi
2. Peran aktor dapat diukur dari konsep kolaborasi Triple Helix
 - a. Dinas Tanaman pangan dan Peternakan kab. Pacitan: pembuat kebijakan,dan fasilitator
 - b. Pemerintah Desa Gemaharjo: Koordinator dan Fasilitator
 - c. PT NESTLE / PT DAS: fasilitator dan Akselerator
 - d. Universitas : Akselerator
 - e. Peternak sapi perah: Implementer/pelaksana
3. Model atau Desain Kolaborasi dapat diukur dari:
 - a. Kondisi awal
 - b. Desain kelembagaan
 - c. Kepemimpinan
 - d. Proses Kolaborasi
4. Keberlanjutan dapat diukur dari:
 - a. Kepercayaan
 - b. Komitmen

- c. Pelatihan/pembinaan
- d. MOU

H. Metodologi Penelitian

a) Pendekatan Penelitian

Dalam eksplorasi ini, metodologi yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Sesuai dengan yang dikatakan oleh McMillan dan Schumacher (dalam Seoiono 2012): "Penelitian kualitatif adalah metodologi yang juga disebut sebagai metodologi yang mendalam dengan alasan bahwa pada umumnya para ilmuwan mengumpulkan informasi dengan cara bertemu secara langsung dan berinteraksi dengan individu-individu di lokasi eksplorasi." Informasi yang dikumpulkan tidak dalam kerangka berpikir angka-angka, namun informasi tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan individu, catatan pembaruan, dan laporan otoritas lainnya. Dengan tujuan bahwa alasan pemeriksaan subjektif ini adalah untuk menggambarkan realitas eksperimental di balik keanehan di dalam dan luar, secara detail dan lengkap.

Jenis eksplorasi ini adalah penelitian deskriptif, lebih spesifik lagi, penulisan yang menggambarkan apa yang sedang terjadi mengenai benda yang diteliti, seperti yang ditunjukkan oleh keadaan asli pada saat eksplorasi langsung. Teknik pemaparan seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2009: 21) adalah strategi yang digunakan untuk menggambarkan atau menyelidiki suatu hasil eksplorasi namun tidak digunakan untuk membuat tujuan yang lebih luas. Dengan demikian, eksplorasi terpancang adalah penelitian yang menyoroti masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat pemeriksaan dilakukan, seharusnya berbeda dengan alasan untuk mendapatkan klarifikasi yang obyektif.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Gemaharjo kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan desa Gemaharjo sendiri merupakan desa yang memiliki potensi yang sangat

banyak baik potensi alam, manusia, kebudayaan dan lain-lain. Selain itu Desa Gemaharjo merupakan Desa Yang pertama kali berhasil mengembangkan sapi perah di Kabupaten Pacitan.

c) Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, Narasumber adalah sumber yang dapat memberikan data yang dibutuhkan. Narasumber merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, dalam menentukan saksi yang akan digunakan untuk memberikan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Strategi purposive sampling adalah dengan cara menyebutkan individu-individu tertentu dari populasi, dibuat pertimbangan-pertimbangan tertentu, dengan memperhatikan sifat-sifat atau ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Model yang digunakan untuk menentukan sampel adalah model orang yang secara langsung berhubungan dengan pengembangan sapi perah di desa Gemaharjo yaitu kepala desa Bapak Harmanto, Ketua kelompok tani Gemah Ripah 4 Bapak Tumadi, Staff PT DAS Mas Alfi Albar dan peternak sapi perah Mbak Vina.

d) Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah melihat dan memperhatikan kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh individu yang diperhatikan, kemudian mencatat konsekuensi dari observasi mereka dengan catatan atau perangkat yang berbeda.

2) Wawancara

Seperti yang diutarakan oleh Lexy J. Moleong, yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu diskusi dengan maksud tertentu. Dalam teknik ini, ahli dan responden bertatap muka untuk memperoleh data lisan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, maka jenis wawancara ini adalah wawancara yang terkoordinasi, yaitu wawancara yang

dilakukan dengan merencanakan terlebih dahulu pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah diatur sebelumnya oleh penanya. Menjauhi pembicaraan yang melenceng dari pokok permasalahan yang diteliti, untuk situasi ini ilmuwan memilih narasumber pada sumber-sumber informasi primer.

3) Dokumentasi

Secara umum, dokumentasi adalah suatu tindakan atau cara yang tepat dalam mengumpulkan, melihat, memeriksa, memanfaatkan, dan memberikan laporan untuk mendapatkan data, informasi penerangan dan bukti untuk menunjukkan kepada publik tentang penemuan-penemuan yang akan didapat oleh para ahli. Dalam ulasan ini, informasi yang dikumpulkan oleh para ilmuwan adalah arsip langsung yang berhubungan dengan eksplorasi seperti latar belakang sejarah kota.

e) Metode Analisis Data

Penelusuran ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara bekerja dengan informasi, memilah-milah informasi, memilihnya, mencari, dan melacak desain. Informasi tersebut kemudian ditelaah dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu perspektif yang berasal dari realitas yang eksplisit dan substansial, kemudian, pada saat itu, realitas atau kejadian yang ada saat ini dibuat kesimpulannya.

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh selama eksplorasi di lapangan berkaitan dengan konsekuensi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2) Reduksi Data

Reduksi data diperoleh dari sumber data primer dan sumber informasi opsional. Sumber data primer adalah informasi yang didapat dan digali langsung dari sumber utama atau subjek eksplorasi. Sumber informasi esensial dalam eksplorasi ini adalah lurah, ketua Bumdes, dan

masyarakat setempat. Sementara itu, sumber informasi tambahan adalah sumber informasi berikutnya setelah sumber informasi esensial. Sumber informasi tambahan diharapkan dapat membantu mengungkap informasi utama. Sumber informasi tambahan berasal dari referensi yang memiliki hubungan dengan tujuan pemeriksaan, dua selebaran, web lokal, dan buku harian yang membahas tentang *Collaborative Governance*. Kemudian, pada saat itu, informasi yang ada dikumpulkan, dirangkum dalam unit-unit pemeriksaan dan informasi yang melihat pada data yang akan dikaji agar dapat menghasilkan gambaran yang nyata tentang penelitian

3) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan bentuk narasi dimana data disajikan dalam bentuk uraian yang beruntutan dan sistematis untuk dapat menjelaskan penelitian secara lebih mendetail dan mudah dipahami oleh pembaca. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi. Tahap ini adalah tahap pengambilan kesimpulan dari setiap informasi yang telah didapat dari hasil penggalan. Membuat kesimpulan atau konfirmasi adalah upaya untuk menemukan atau memahami makna, keteraturan, desain, klarifikasi, alur sebab akibat, atau rekomendasi. Sebelum membuat kesimpulan, dilakukan pengurangan informasi, sajian informasi, dan penarikan kesimpulan atau pengecekan terhadap kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Sesuai dengan penilaian Miles dan Huberman, siklus pemeriksaan tidak hanya satu kali, namun cerdas, bergantian antara pengurangan, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau latihan konfirmasi selama waktu eksplorasi. Setelah melakukan konfirmasi, kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperkenalkan dalam struktur cerita. Mencapai penentuan adalah fase terakhir dari rangkaian aktivitas eksplorasi informasi. Penarikan kesimpulan adalah fase terakhir dari pengumpulan informasi.

f) Keabsahan Data

Menetapkan keabsahan suatu data memerlukan strategi yang tepat. Pelaksanaan prosedur penilaian bergantung pada empat standar, yaitu tingkat keandalan, kemampuan beradaptasi, dapat dipercaya, dan keyakinan. Dalam metode pengumpulan informasi, triangulasi dicirikan sebagai strategi pengumpulan informasi yang menggabungkan prosedur pengumpulan informasi yang berbeda dan sumber informasi yang sudah ada. Dengan asumsi analisis mengumpulkan informasi dengan triangulasi, spesialis benar-benar mengumpulkan informasi sambil menguji validitas informasi, khususnya memeriksa keterpercayaan informasi dengan prosedur bermacam-macam informasi dan sumber informasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan strategi triangulasi sumber yang berarti, untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber dengan metode yang serupa yang menggabungkan:

- a. Membandingkan informasi persepsi dengan informasi wawancara
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan hal-hal yang berkaitan dalam suatu catatan yang berkaitan.

